

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : 486/103.08/MN/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK Negeri 1 Mojostrongo
Alamat : Negalwire Mojostrongo
Poyolali
Status : Negeri

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Pertanian
b. Program Keahlian : Budidaya Tanaman
c. Teknologi Hasil Pertanian
d. Mekanisasi Pertanian
e. Budi Daya Ternak

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Mojostrongo NO: 183/103.29/SMK.02/NU/2000 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000 / 2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur



Drs. Soemardjo, M.M.
★ NIP. 130340135



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 421.5 / 2104 / 13 / 20.

TENTANG

PENETAPAN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK PEMESINAN
SMK NEGERI 1 MOJOSONGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan ;
 - b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - c. Bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pembukaan Program Keahlian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara RI Nomor 4548) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0400/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tat Kerja Dinas-dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pembukaan Program Keahlian **Teknik Pemesinan** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mojosongo, Kabupaten Boyolali
- KEDUA** : Pembiayaan penyelenggaraan Pembukaan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mojosongo Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan bantuan lain yang sah
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOYOLALI
Tanggal : Juli 2007

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL,
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan ditujukan kepada, Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah,;
3. Bupati Boyolali
4. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali;
8. Pertinggal.

SK IJIN MENDIRIKAN
PROGAM STUDI KEAHLIAN
TEKNIK KIMIA



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 421.5/1920.12.2010

TENTANG

**PENETAPAN PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN TEKNIK KIMIA
PROGRAM KEAHLIAN KIMIA INDUSTRI
SMK NEGERI 1 MOJOSONGO BOYOLALI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Manajemen Sekolah Berbasis Masyarakat, masyarakat diberi hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- c. bahwa agar pembukaan program di satuan Pendidikan Kabupaten Boyolali memiliki dasar hukum yang kuat, dipandang perlu untuk menetapkan pembukaan program di sekolah dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara RI Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pembukaan Bidang Keahlian Teknik Kimia Program Keahlian Teknik Kimia Industri SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali.
- KEDUA : Tugas Utama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mojosongo Boyolali berkaitan dengan program baru tersebut adalah :
1. Mempersiapkan dan melaksanakan 8 standar nasional pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan Tindak Lanjut dengan standar minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 21 Mei 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Dis. Mulyono Santoso, M.Si
Pembina Tk.1

NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Bupati Boyolali
5. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
6. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Boyolali
9. Perlinggal



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/O/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATAKERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1997

Am 19/5/97

NO	SMK	STANIS	BOLOALI
26/5/97	8007.972		
PARA			

26/5/1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

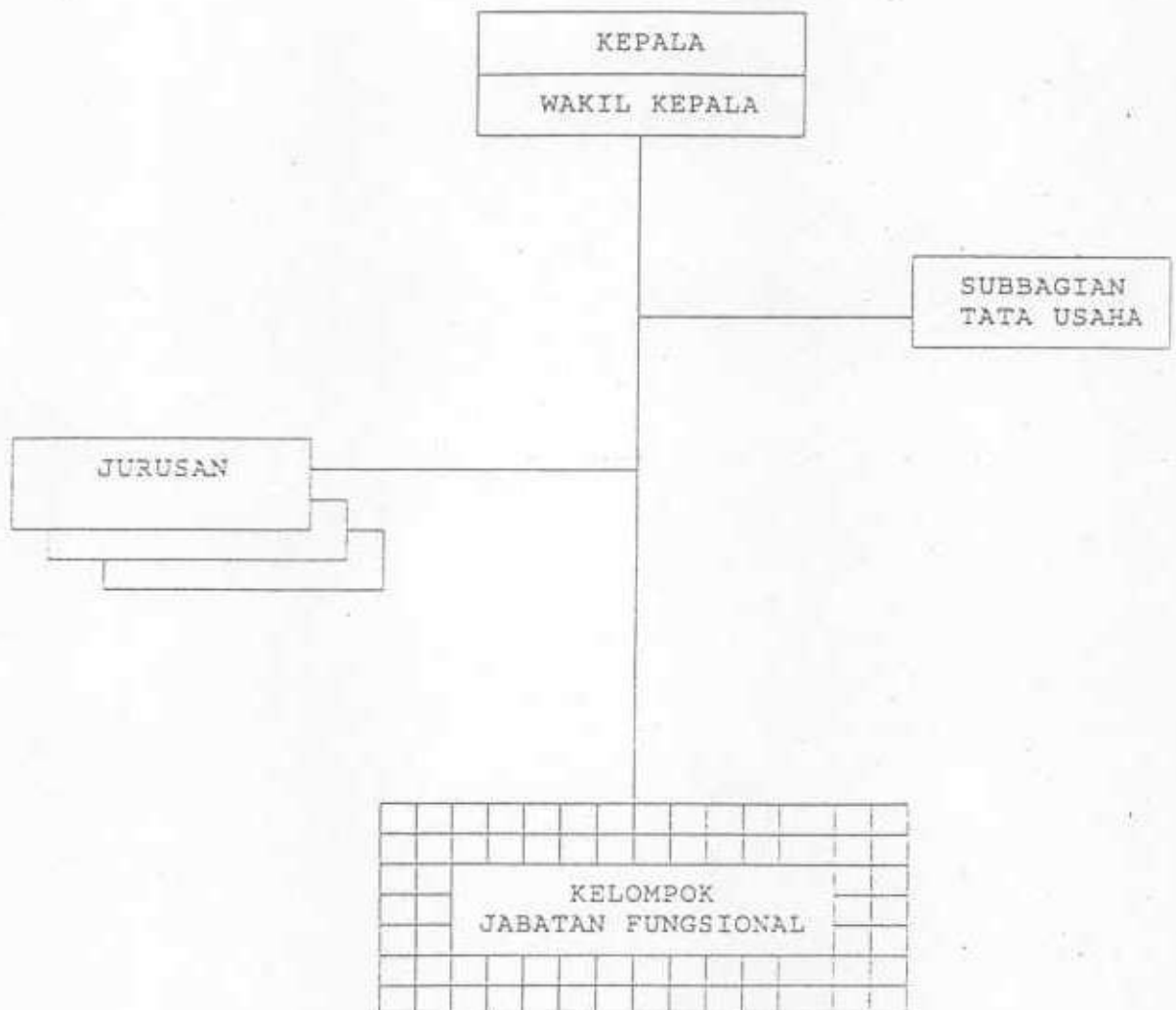
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

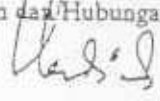
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


Mardiyah
NIP. 130344753 

file salinan 27/11/93

NO		PROVINSI		SEKOLAH KASAL				SEKOLAH HASIL PERUBAHAN				Peta					
		NAMA SEKOLAH KODE KANTON		LOKASI SEKOLAH		KEPUTUSAN KELEMBAGAAN		NAMA SEKOLAH KODE KANTON		KECAMATAN		KAB/KODIA/ KOTIP					
				ALAMAT SEKOLAH		KECAMATAN		KAB/KODIA/ KOTIP									
1		2		3		4		5		6		7		8		10	
III JAWA TENGAH																	
1.		STM Neg. 1 Semarang Kantor 156217		Jl. Dr. Cipto No. 93 Desa/Kel. Sawijito		Semarang Utara		Kotamadia Semarang		090/0/79 26-05-79		SMK Neg. 1 Semarang Kantor 156217		Semarang Utara		Kotamadia Semarang	
2.		SMEA Neg. 1 Semarang Kantor 156622		Jl. Dr. Cipto No. 121A Desa/Kel. Karangturi		Semarang Utara		Kotamadia Semarang		263/1/31/Ked/51 28-06-51		SMK Neg. 2 Semarang Kantor 156622		Semarang Utara		Kotamadia Semarang	
3.		STM Neg. 3 Semarang Kantor 156238		Jl. Sompok Lama No. 43 Desa/Kel. Paterongan		Semarang Utara		Kotamadia Semarang		129/0/pt/31/64 22-09-64		SMK Neg. 3 Semarang Kantor 156238		Semarang Utara		Kotamadia Semarang	
4.		STM Neg. 4 Semarang Kantor 156242		Jl. Pandanaran II/17 Desa/Kel. Mugas Sari		Semarang Timur		Kotamadia Semarang		117/1/954 23-10-64		SMK Neg. 4 Semarang Kantor 156242		Semarang Timur		Kotamadia Semarang	
5.		STM Neg. 5 Semarang Kantor 156259		Jl. Dr. Cipto No. 121 Desa/Kel. Karangturi		Semarang Utara		Kotamadia Semarang		85/D/pt/BI/65 03-08-65		SMK Neg. 5 Semarang Kantor 156259		Semarang Utara		Kotamadia Semarang	
6.		SMKK Neg. Semarang Kantor 156160		Jl. Sidodadi Barat No. 8 Desa/Kel. Karangturi		Semarang Utara		Kotamadia Semarang		0190/0/1972 14-12-72		SMK Neg. 6 Semarang Kantor 156160		Semarang Utara		Kotamadia Semarang	
7.		STM Pembangunan Neg. Semarang Kantor 204567		Jl. Simpang Lima Desa/Kel. Mugas Sari		Semarang Timur		Kotamadia Semarang		0310/0/1975 31-12-75		SMK Neg. 7 Semarang Kantor 204567		Semarang Timur		Kotamadia Semarang	
8.		SMPS Neg. Semarang Kantor 155165		Jl. Pandanaran II/12 Desa/Kel. Mugas Sari		Semarang Timur		Kotamadia Semarang		0314/0/1975 31-12-75		SMK Neg. 8 Semarang Kantor 155165		Semarang Timur		Kotamadia Semarang	
9.		SMEA Neg. 2 Semarang Kantor 156786		Jl. Paterongan Sari No. 2 Desa/Kel. Paterongan		Semarang Selatan		Kotamadia Semarang		0287/0/1976 29-11-76		SMK Neg. 9 Semarang Kantor 156786		Semarang Selatan		Kotamadia Semarang	
10.		UMT Pekapalan Neg. Semarang Kantor 156263		Jl. Kolosono Desa/Kel. Panggung Kidul		Semarang Barat		Kotamadia Semarang		0209/0/76 09-12-76		SMK Neg. 10 Semarang Kantor 156263		Semarang Barat		Kotamadia Semarang	
11.		SMK Grafika Neg. Semarang Kantor 531247		Jl. Cemwa Raya Desa/Kel. Banyumanih		Banyumanih		Kotamadia Semarang		0309/0/1990 11-06-90		SMK Neg. 11 Semarang Kantor 531247		Banyumanih		Kotamadia Semarang	
12.		UMT Perburuan Neg. Bawen Kantor 156270		Jl. Kutim No. 119 Desa/Kel. Bawen		Bawen		Kabupaten Semarang		03/D/pt/BI/85 27-07-85		SMK Neg. 1 Bawen Kantor 156270		Bawen		Kabupaten Semarang	
13.		SMEA Neg. Tegal Kantor 156725		Jl. Karanganyar No. 17 Desa/Kel. Kauman Kulon		Dukuhturi		Kabupaten Tegal		2144/83/Ked/1 22-09-83		SMK Neg. 1 Dukuhturi Kantor 156725		Dukuhturi		Kabupaten Tegal	
14.		SMKK Neg. Tegal Kantor 156195		Jl. Dr. Sutomo No. 66 Desa/Kel. Pekauman		Tegal Barat		Kotamadia Tegal		0193/0/74 24-07-74		SMK Neg. 1 Tegal Kantor 156195		Tegal Barat		Kabupaten Tegal	
15.		SMEA Neg. Kodya Tegal Kantor 523388		Jl. Wisanggeni No. 1 Desa/Kel. Sitarog		Tegal Timur		Kotamadia Tegal		0135/0/1989 14-03-89		SMK Neg. 2 Tegal Kantor 523388		Tegal Timur		Kabupaten Tegal	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	SMEA Neg. Slawi Kantor 156750	Jl. KH. Agus Salim Desa/Kel. Kendal Saut	Slawi	Kabupaten Tegal	59/93/Ked/1967 18-03-76	SMK Neg. 1 Slawi Kantor 156750	Slawi	Kabupaten Tegal	
17.	SMT Pert. Neg. Procol Tegal Kantor 150200	Jl. Jend. Achmad Yani Slawi Desa/Kel. Procol	Slawi	Kabupaten Tegal	ax-001/Kel/PDT/66 03-01-09	SMK Neg. 2 Slawi Kantor 150200	Slawi	Kabupaten Tegal	
18.	STM Neg. Tegal Kantor 201785	Jl. Raya II Kolah Pos Adiwerna Desa/Kel. Pekuwah	Adiwerna	Kabupaten Tegal	0100/01/079 03-09-79	SMK Neg. 1 Adiwerna Kantor 201785	Adiwerna	Kabupaten Tegal	
19.	STM Neg. Magelang Kantor 156661	Jl. Cawang No.2 Desa/Kel. Jurangombo	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang	136/Dip/BU/85 08-10-85	SMK Neg. 1 Magelang Kantor 156661	Magelang Selatan	Kotamadia Magelang	
20.	SMEA Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Jend. A. Yani No. 135 A Desa/Kel. Kedung Sari	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	134/UKK/1968 08-04-68	SMK Neg. 2 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	
21.	SMKK Neg. Magelang Kantor 156064	Jl. Piere Tendean No. 1 Desa/Kel. Magelang	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	0290/01/1980 30-07-80	SMK Neg. 3 Magelang Kantor 156064	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	
22.	STM Pertanian Neg. Salam Kantor 156327	Jl. Ds. Krapyak Seloboro Desa Kel. Seloboro	Salam	Kabupaten Magelang	93/Dip/BU/65 27-07-65	SMK Neg. 1 Salam Kantor 156327	Salam	Kabupaten Magelang	
23.	SMKK Neg. Pekalongan Kantor 156174	Jl. Kramatari Indah No. 90 Desa/Kel. Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	30/UKK 370 05-03-70	SMK Neg. 1 Pekalongan Kantor 156174	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	
24.	SMEA Neg. Pekalongan Kantor 156777	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel. Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	58/UKK/1970 15-05-70	SMK Neg. 2 Pekalongan Kantor 156767	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	
25.	STM Pembangunan Neg. Pekalongan Kantor 204571	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel. Kramatsari	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	0310/01/1975 31-12-75	SMK Neg. 3 Pekalongan Kantor 204571	Pekalongan Barat	Kotamadia Pekalongan	
26.	STM Neg. Pekalongan Kantor 201771	Jl. Paesan Utara Kedungwuni Desa/Kel. Paesan Utara	Kedungwuni	Kotamadia Pekalongan	0190/01/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Kedungwuni Kantor 201771	Kedungwuni	Kotamadia Pekalongan	
27.	SMEA Neg. Salatiga Kantor 156036	Jl. Nakula Sadewo U/3 Desa/Kel. Dukuh	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga	191/UKK/1968 25-05-68	SMK Neg. 1 Salatiga Kantor 156036	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga	
28.	SMEA Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Jl. Sungai Kapiuas No.25 Desa/Kel. Kedung Lumbu	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	090/01/1979 26-05-79	SMK Neg. 1 Surakarta Kantor 158661	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	
29.	STM Neg. 1 Surakarta Kantor 158675	Jl. L.U. Adi Sucipto No.33 Desa/Kel. Manahan	Banjarsari	Kotamadia Surakarta	3095/B/1952 01-07-52	SMK Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	Banjarsari	Kotamadia Surakarta	
30.	SMEA Neg. 2 Surakarta Kantor 158675	Jl. Arifin No.17 Desa/Kel. Danusuman	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	574/B/III/57 08-02-57	SMK Neg. 3 Surakarta Kantor 158675	Pasar Kliwon	Kotamadia Surakarta	
31.	SMKK Neg. Surakarta Kantor 158917	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 40 Desa/Kel. Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	531/031/Ked/ 26-10-64	SMK Neg. 4 Surakarta Kantor 158917	Laweyan	Kotamadia Surakarta	
32.	STM Neg. 2 Surakarta Kantor 158260	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 42 Desa/Kel. Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	8865/DIP.PT/E 07-08-65	SMK Neg. 5 Surakarta Kantor 158260	Laweyan	Kotamadia Surakarta	
33.	SMEA Neg. 3 Surakarta Kantor 158682	Jl. L.U. Adi Sucipto No. 38 Desa/Kel. Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	103/UKK/68 21-03-68	SMK Neg. 6 Surakarta Kantor 158682	Laweyan	Kotamadia Surakarta	
34.	StUPS Neg. Surakarta Kantor 158345	Jl. Jenderal A. Yani No. 374 Desa/Kel. Kerten	Laweyan	Kotamadia Surakarta	0314/01/1975 31-12-75	SMK Neg. 7 Surakarta Kantor 158345	Laweyan	Kotamadia Surakarta	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	SMK Neg. Surakarta Kantor 158070	Jl. Kepadatan Desa/Kel. Kujabahan Wulan	Jl. Kepatihan Desa/Kel. Kujabahan Wulan	Jelres	Kotamedia Surakarta	02020/1076 00-12-76	SMK Neg. 8 Surakarta Kantor 158070	Jelres	Kotamedia Surakarta
36.	SMK Neg. Surakarta Kantor 531231	Jl. Tarmunegara Desa/Kel. Banyu Anyar	Jl. Tarmunegara Desa/Kel. Pucang	Jelres	Kotamedia Surakarta	0300/01/000 11-08-00	SMK Neg. 0 Surakarta Kantor 531231	Jelres	Kotamedia Surakarta
37.	SMEA Neg. Banyuwangi Kantor 159727	Jl. Raya Pucang No. 30 Desa/Kel. Pucang	Jl. Dr. Soeparto No. 29 Desa/Kel. Purwokerto Wulan	Bawang	Kabupaten Banyuwangi	400/113/Kel 11-08-05	SMK Neg. 1 Bawang Kantor 159727	Bawang	Kabupaten Banyuwangi
38.	SMEA Neg. Purwokerto Kantor 158581	Jl. Dr. Soeparto No. 29 Desa/Kel. Purwokerto Wulan	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 81 Desa/Kel. Krayi	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	810/103/Med 10-08-53	SMK Neg. 1 Purwokerto Kantor 158581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
39.	STM Neg. Purwokerto Kantor 159581	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 81 Desa/Kel. Krayi	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 81 Desa/Kel. Krayi	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	402/XI/1968 28-02-68	SMK Neg. 2 Purwokerto Kantor 159581	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
40.	SMK Neg. Purwokerto Kantor 159272	Jl. Jend. A. Yani Desa/Kel. Soka Negara	Jl. Jend. A. Yani Desa/Kel. Soka Negara	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas	0200/01/1076 09-12-76	SMK Neg. 3 Purwokerto Kantor 159272	Purwokerto Timur	Kabupaten Banyumas
41.	SMEA Neg. Banyumas Kantor 159706	Jl. Pramuka No. 1 Desa/Kel. Kajawa	Jl. Pramuka No. 1 Desa/Kel. Kajawa	Banyumas	Kabupaten Banyumas	133/UKK/68 08-04-68	SMK Neg. 1 Banyumas Kantor 159706	Banyumas	Kabupaten Banyumas
42.	SMT Pertanian Neg. Purwokerto Kantor 159595	Jl. Raya Purwokerto - Banyumas Km 12 Desa/Kel. Kalibagor	Jl. Raya Purwokerto - Banyumas Km 12 Desa/Kel. Kalibagor	Kalibagor	Kabupaten Banyumas	0301/01/1982 09-10-82	SMK Neg. 1 Kalibagor Kantor 159595	Kalibagor	Kabupaten Banyumas
43.	SMEA Neg. Batang Kantor 192081	Jl. Ki Hlangunsakoro No. 2 Desa/Kel. Royongnggan	Jl. Ki Hlangunsakoro No. 2 Desa/Kel. Royongnggan	Batang	Kabupaten Batang	0251/01/1977 01-07-77	SMK Neg. 1 Batang Kantor 192081	Batang	Kabupaten Batang
44.	SMEA Neg. Cepu Kantor 158682	Jl. Pemuda No. 33 B Desa/Kel. Ngerang	Jl. Pemuda No. 33 B Desa/Kel. Ngerang	Cepu	Kabupaten Blora	480/83/Ked 11-08-85	SMK Neg. 1 Cepu Kantor 158682	Cepu	Kabupaten Blora
45.	STM Neg. Blora Kantor 501095	Jl. Gatot Subroto Km 41 Desa/Kel. Taman Rejo	Jl. Gatot Subroto Km 41 Desa/Kel. Taman Rejo	Blora	Kabupaten Blora	0311/UKK/68 23-11-68	SMK Neg. 1 Blora Kantor 501095	Blora	Kabupaten Blora
46.	SMEA Neg. Blora Kantor 156771	Jl. Rajawadi No. 11 Desa/Kel. Tempelan	Jl. Rajawadi No. 11 Desa/Kel. Tempelan	Blora	Kabupaten Blora	098/01/1975 20-05-75	SMK Neg. 2 Blora Kantor 156771	Blora	Kabupaten Blora
47.	SMEA Neg. Boyolali Kantor 158739	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel. Klejo	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa/Kel. Klejo	Boyolali	Kabupaten Boyolali	136/UKK/1968 09-04-68	SMK Neg. 1 Boyolali Kantor 158739	Boyolali	Kabupaten Boyolali
48.	SMT Pertanian Neg. Boyolali Kantor 201745	Jl. Tegalarwa Desa/Kel. Tegalarwa	Jl. Tegalarwa Desa/Kel. Tegalarwa	Mojetongo	Kabupaten Boyolali	0250/07/79 03-11-79	SMK Neg. 1 Mojetongo Kantor 201745	Boyolali	Kabupaten Boyolali
49.	SMEA Neg. Banyudono Kantor 201702	Jl. Kuwahan No. 3 Desa/Kel. Kuwahan	Jl. Kuwahan No. 3 Desa/Kel. Kuwahan	Banyudono	Kabupaten Boyolali	0190/C/79 03-05-79	SMK Neg. 1 Banyudono Kantor 201702	Banyudono	Kabupaten Boyolali
50.	SMEA Neg. Brebes Kantor 156746	Jl. Dr. Setia Budi Desa/Kel. Brebes	Jl. Dr. Setia Budi Desa/Kel. Brebes	Brebes	Kabupaten Brebes	36/PP/IV/87 02-10-87	SMK Neg. 1 Brebes Kantor 156746	Brebes	Kabupaten Brebes
51.	SMEA Neg. Cilacap Kantor 159731	Jl. Ilusi Otonomi No. 10 Desa/Kel. Sidukaya	Jl. Ilusi Otonomi No. 10 Desa/Kel. Sidukaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	329/UKK/68 07-10-68	SMK Neg. 1 Cilacap Kantor 159731	Cilacap	Kabupaten Cilacap
52.	STM Neg. Cilacap Kantor 155201	Jl. Dulah Otonomi No. 8 Desa/Kel. Sidukaya	Jl. Dulah Otonomi No. 8 Desa/Kel. Sidukaya	Cilacap	Kabupaten Cilacap	0200/0/78 15-09-78	SMK Neg. 2 Cilacap Kantor 155201	Cilacap	Kabupaten Cilacap
53.	SMEA Neg. Demak Kantor 158814	Jl. Kutoran No. 05 Desa/Kel. Katonsari	Jl. Kutoran No. 05 Desa/Kel. Katonsari	Demak	Kabupaten Demak	0426/01/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Demak Kantor 158814	Demak	Kabupaten Demak
54.	SMEA Neg. Purwodadi Kantor 158835	Jl. Pangeran Diponegoro No. 24 Desa/Kel. Danyang	Jl. Pangeran Diponegoro No. 24 Desa/Kel. Danyang	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi	0426/01/1991 15-07-91	SMK Neg. 1 Purwodadi Kantor 158835	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	STM Perlarian Neg. Sawit Kantor 158303	Jl. Mulyoharjo Desa/Kel.: Mulyoharjo	Jepara	Kabupaten Jepara	205/10/75 17-11-75	SMK Neg.1 Jepara Kantor 158303	Jepara	Kabupaten Jepara	
56.	SMK Neg. Jepara Kantor 158291	Jl. RMP. Sosio Kartono No.1 Desa/Kel.: Pingkol	Jepara	Kabupaten Jepara	0312/0/75 31-12-75	SMK Neg.2 Jepara Kantor 158291	Jepara	Kabupaten Jepara	
57	SMEA Neg. Jepara Kantor 158291	Jl. Ks. Tubun No.3 Desa/Kel.: Dematan	Jepara	Kabupaten Jepara	0236/0/81 25-07-81	SMK Neg.3 Jepara Kantor 158291	Jepara	Kabupaten Jepara	
58.	SMEA Neg. Karanganyar/Ska. Kantor 158718	Jl. Ngallan Desa/Kel.: Tegalgede	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	973/B3/Kedj 07-11-83	SMK Neg.1 Karanganyar Kantor 158718	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	
59.	SMEA Neg. Kebumen Kantor 156678	Jl. Cemawa No. 37 Desa/Kel.: Karangasri	Kebumen	Kabupaten Kebumen	81/B3/Kedj 16-02-67	SMK Neg.1 Kebumen Kantor 156678	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
60.	SMEA Neg. Karanganyar/Kbm. Kantor 156699	Jl. Revolusi No.31 Desa/Kel.: Karanganyar	Karanganyar	Kabupaten Kebumen	106/UKK3/68 23-03-68	SMK Neg.1 Karanganyar Kantor 156699	Karanganyar	Kabupaten Kebumen	
61.	STM Neg. Kebumen Kantor 156310	Jl. Kembangan - Sumberaji Desa/Kel.: Sumberaji	Kebumen	Kabupaten Kebumen	0121/0/1972 08-08-72	SMK Neg.2 Kebumen Kantor 156310	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
62.	SMEA Neg. Kendal Kantor 192098	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel.: Purwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	0167/0/1977 30-05-77	SMK Neg.1 Kendal Kantor 192098	Patebon	Kabupaten Kendal	
63.	STM Neg. Kendal Kantor 518561	Jl. Raya Barat Kendal Desa/Kel.: Purwokerto	Patebon	Kabupaten Kendal	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg.2 Kendal Kantor 518561	Patebon	Kabupaten Kendal	
64.	SMEA Neg.1 Klaten Kantor 158696	Jl. Kalimantan 22 Desa/Kel.: Sekarsut	Kelantan	Kabupaten Klaten	685/B3/Kedj 26-06-61	SMK Neg.1 Klaten Kantor 158696	Kelantan	Kabupaten Klaten	
65.	STM Neg. Klaten Kantor 158277	Jl. Kalimantan No.18 Desa/Kel.: Senden	Ngawen	Kabupaten Klaten	54/Drp/BI/85 27-07-85	SMK Neg.2 Klaten Kantor 158277	Ngawen	Kabupaten Klaten	
66.	SMEA Neg.2 Klaten Kantor 158785	Jl. Kalimantan No.20 Desa/Kel.: Belang Wetan	Klaten	Kabupaten Klaten	0426/D/1991 15-07-91	SMK Neg.4 Klaten Kantor 158785	Klaten	Kabupaten Klaten	
67.	SMEA Neg. Gondang Winangun Kantor 158750	Jl. Tegai Mas Desa/Kel.: Prawatan	Jogonalan	Kabupaten Klaten	28/UKK3/1988 06-02-88	SMK Neg.1 Jogonalan Kantor 158750	Jogonalan	Kabupaten Klaten	
68.	SMEA Neg. Pedan Kantor 158701	Jl. Bhayangkara Desa/Kel.: Sabayan	Pedan	Kabupaten Klaten	32/UKK3/1988 10-02-88	SMK Neg.1 Pedan Kantor 158701	Pedan	Kabupaten Klaten	
69.	SMEA Neg. Delanggu Kantor 158764	Jl. Mersien, Juwiring, De-aniss Desa/Kel.: Misen	Juwiring	Kabupaten Klaten	0210/0/1978 24-06-78	SMK Neg.1 Juwiring Kantor 158764	Juwiring	Kabupaten Klaten	
70.	SMKX Neg. Klaten Kantor 192191	Jl. Merapi No. 11 Desa/Kel.: Gayamsari	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten	0327/0/1977 28-07-77	SMK Neg.3 Klaten Kantor 192191	Klaten Tengah	Kabupaten Klaten	
71.	SMT Perlarian Neg. Delanggu Kantor 158298	Jl. Sabranglor Desa/Kel.: Sabranglor	Trucuk	Kabupaten Klaten	93/Drp/BI/85 27-07-85	SMK Neg.1 Trucuk Kantor 158298	Trucuk	Kabupaten Klaten	
72.	SMEA Neg. Kudus Kantor 156640	Jl. Ganesh II Desa/Kel.: Purwodadi	Kudus	Kabupaten Kudus	122/UKK3/1988 04-04-88	SMK Neg.1 Kudus Kantor 156640	Kudus	Kabupaten Kudus	
73.	SMEA Neg. Pati Kantor 156557	Jl. A. Yani 1 Desa/Kel.: Sidokerto	Pati	Kabupaten Pati	283/B3/Kedj 31-12-86	SMK Neg.1 Pati Kantor 156557	Pati	Kabupaten Pati	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	SMKK Neg. Pati Kantor 206042	Jl. Kolonel Sunandar 3 Desa/Kel. Winong	Pati	Kabupaten Pati	0209/01/1080 30-07-80	SMK Neg. 3 Pati Kantor 206042	Pati	Kabupaten Pati	
75	STM Neg. Pati Kantor 192103	Jl. Raya Gambong 4 Hlonoblo Desa/Kel. Muktiharjo	Margorejo	Kabupaten Pati	0137/01/1077 30-05-77	SMK Neg. 2 Pati Kantor 192103	Margorejo	Kabupaten Pati	
76	SMEA Neg. Pemalang Kantor 156732	Jl. Galot Sutrisno Desa/Kel. Bojongsaba	Pemalang	Kabupaten Pemalang	36/UKK3/1968 12-02-66	SMK Neg. 1 Pemalang Kantor 156732	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
77	SMEA Neg. Purbalingga Kantor 159744	Jl. Raya Kalmanah Desa/Kel. Selabaya	Kulmanah	Kabupaten Purbalingga	14/UKK3/58 09-04-66	SMK Neg. 1 Purbalingga Kantor 159744	Kulmanah	Kabupaten Purbalingga	
78	SMEA Neg. Kutawaja Kantor 156704	Jl. Semawung Dalam Desa/Kel. Semawung Dalam	Kutawaja	Kabupaten Purworejo	60/B-3.4/Kep/67 17-03-67	SMK Neg. 1 Kutawaja Kantor 156704	Kutawaja	Kabupaten Purworejo	
79	STM Neg. Purworejo Kantor 156306	Jl. Jend. Sudirman Kotak Pos 127 Desa/Kel. Kledung Kraton	Banyuwir	Kabupaten Purworejo	38/Kep Dfpu/87 18-10-87	SMK Neg. 1 Purworejo Kantor 156306	Banyuwir	Kabupaten Purworejo	
80	SMKK Neg. Purworejo Kantor 156181	Jl. Kartini No 5 Desa/Kel. Sinduran	Purworejo	Kabupaten Purworejo	16/UKK3/1969 16-01-69	SMK Neg. 2 Purworejo Kantor 156181	Purworejo	Kabupaten Purworejo	
81	STM Neg. Rembang Kantor 201764	Jl. Untung Surapati No. 1 Desa/Kel. Magesari	Rembang	Kabupaten Rembang	0190/01/1979 03-09-79	SMK Neg. 1 Rembang Kantor 201764	Rembang	Kabupaten Rembang	
82	SMEA Neg. Sragen Kantor 158722	Jl. Ronggowarsito 11 Desa/Kel. Sragen Wana	Sragen	Kabupaten Sragen	41/UKK3/1968 17-02-68	SMK Neg. 1 Sragen Kantor 158722	Sragen	Kabupaten Sragen	
83	SMK Pertanian Neg. Sragen Kantor 158281	Jl. Bendungan Kedawung Desa/Kel. Bendungan	Kedawung	Kabupaten Sragen	0301/01/1982 09-10-82	SMK Neg. 1 Kedawung Kantor 158281	Kedawung	Kabupaten Sragen	
84	SMEA Neg. Sukoharjo Kantor 158743	Jl. Sudirman No. 131 Desa/Kel. Jombar	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo	120/UKK3/1968 09-04-68	SMK Neg. 1 Sukoharjo Kantor 158743	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo	
85	STM Pembangunan Neg. Temanggung Kantor 204588	Jl. Kady Hwon, Kotak Pos 114 Desa/Kel. Sidorejo	Temanggung	Kabupaten Temanggung	0310/01/1975 31-12-75	SMK Neg. 1 Temanggung Kantor 204588	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
86	SMEA Neg. Temanggung Kantor 500946	Jl. Kartini No. 14 B Desa/Kel. Jamparejo	Temanggung	Kabupaten Temanggung	0559/01/1984 20-11-84	SMK Neg. 2 Temanggung Kantor 500946	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
87	SMEA Neg. Wonogiri Kantor 201807	Jl. Ajuna Vi, Kotak Pos 273:2 Desa/Kel. Wonorejo	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	0190/01/1979 09-03-79	SMK Neg. 1 Wonogiri Kantor 201807	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	
88	SMEA Neg. Wonosobo Kantor 156711	Jl. Bhayangkara No. 12 Desa/Kel. Wonosobo	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	112/UKK3/68 26-03-68	SMK Neg. 1 Wonosobo Kantor 156711	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	

Halaman 51

NAMA SEKOLAH ASAL		SEKOLAH HASIL PERUBAHAN							
NO	PROVINSI	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH		KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVII. TIMOR TIMUR									
		1. SMEA Neg. Dili Kantor 205005	Jl. Bekora, Kotak Pos 362 Desa/Kel. Bekora Kotak Pos 362	Dili Timur	Kabupaten Dili	0196/0/80 16-07-80	SMK Neg. 1 Dili Kantor 205005	Dili Timur	Kabupaten Dili
		2. STM Neg. Dili Kantor 517594	Jl. Bekora Dili Timur Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0690/0/1986 22-11-86	SMK Neg. 2 Dili Kantor 517594	Dili Timur	Kabupaten Dili
		3. SMK Neg. Dili Kantor 520372	Jl. Bekora, Bekora Desa/Kel.: Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 3 Dili Kantor 520372	Dili Timur	Kabupaten Dili
		4. SMK Neg. 1 Dili Kantor 547483	Jl. Bekora Desa/Kel. Bekora	Dili Timur	Kabupaten Dili	0261/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 4 Dili Kantor 547483	Dili Timur	Kabupaten Dili
		5. SMEA Neg. Aileu Kantor 520386	Asirimau Desa/Kel. Asirimau	Aileu Kota	Kabupaten Aileu	052/0/1988 08-02-88	SMK Neg. 1 Aileu Kantor 520386	Aileu Kota	Kabupaten Aileu
		6. SMEA Neg. Oekusi/Ambeno Kantor 517620	Jl. Bandara No. 3 Desa/Kel.: Costa	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno	0888/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Oekusi Kantor 517620	Pantai Makassar	Kabupaten Ambeno
		7. SMT Pertanian Neg. Suai Kantor 535347	Suai Loro Desa/Kel. Suai Loro Kasarak	Suai Kota	Kabupaten Kovalima	0283/0/1991 30-05-91	SMK Neg. 1 Suai Kantor 535347	Suai Kota	Kabupaten Kovalima
		8. SMEA Neg. Liquisa Kantor 517637	Jl. Raya Liquisa Desa/Kel. Maumelo	Liquisa	Kabupaten Liquisa	0889/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Liquisa Kantor 517637	Liquisa	Kabupaten Liquisa
		9. SMEA Neg. Manatuto Kantor 517616	Jl. Laclubar Desa/Kel.: Aileas	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto	0688/0/1986 22-12-86	SMK Neg. 1 Manatuto Kantor 517616	Manatuto Kota	Kabupaten Manatuto
		10. SMEA Neg. 1 Same Kantor 547505	Desa/Kel. Lateicho	Same Kota	Kabupaten Manufahi	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Same Kantor 547505	Same Kota	Kabupaten Manufahi
		11. SMEA Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Jl. Jendral Sucirman, Berci Desa/Kel. Carabobo	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque	0216/0/1992 05-05-92	SMK Neg. 1 Viqueque Kantor 547490	Viqueque Kota	Kabupaten Viqueque

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

titid.


Mardiyah
NIP. 130344753

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro